

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN  
DAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana ( S1  
) kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh :**

**ALDI PRIMANANDA**

**2017/17060092**

**ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN  
DAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA DI INDONESIA**

Nama : Aldi Primananda  
BP/NIM : 2017/17060092  
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2022


Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

  
**Dr. Novya Zulfa Riani, S.E., M.Si**  
NIP.19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pembimbing

  
**Yeniwati, S.E., M.E.**  
NIP. 19760222 200501 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**



*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN DAN  
BANTUAN SOSIAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI  
INDONESIA**

Nama : Aldi Primananda  
NIM/TM : 17060092/2017  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 29 Agustus 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Yeniwati, S.E.,M.E.	1. 
2	Anggota	: Dr. Sri Ulfa Sentosa,MS	2. 
3	Anggota	: Mike Triani, S.E.,M.M.	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Aldi Primananda  
NIM / Tahun Masuk : 17060092/2017  
Tempat / Tanggal Lahir : Solok, 08 November 1998  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X  
Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.  
No. Hp/Telepon : 081230313283  
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan  
dan Bantuan Sosial terhadap Kualitas Sumber Daya  
Manusia di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 28 Juli 2022  
Yang menyatakan



Aldi Primananda  
NIM. 17060092

## ABSTRAK

**Aldi Primananda (17060092) : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Bantuan Sosial terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Ibu Yeniwati, S.E, M.E**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia (2) Pengaruh program bantuan pangan non tunai terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia (3) Pengaruh program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia (4) Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, dan program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia, DJPK Kemenkeu, Kemensos, dan PIP Kemendikbud. Dengan variabel penelitian yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang ada pada penelitian ini ditetapkan sebagai kualitas sumber daya manusia serta variabel bebas terdiri dari pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, dan program Indonesia pintar. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model* (REM) dengan *cross section* 34 provinsi di Indonesia dan *time series* 2018-2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (2) Program bantuan pangan non tunai berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (3) Program Indonesia pintar berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia (4) Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, dan program Indonesia pintar secara bersama sama berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

**Kata Kunci: IPM, Kualitas SDM, Pengeluaran Pemerintah, Kesehatan, Bansos, BPNT, PIP.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan bantuan sosial terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

Dalam proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan dan bantuan serta saran dari berbagai pihak yang diperoleh penulis dapat mempermudah dalam proses pembelajaran ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Idris, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Joan Marta, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Ibu Yeniwati, S.E, M.E selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing yang telah memberikan banyak pelajaran, motivasi, kritik dan saran yang sangat berharga bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini di waktu yang diinginkan.
5. Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, MS selaku penguji I yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Mike Triani, S.E, M.M selaku penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
8. Kak Lidya selaku Admin Jurusan yang telah banyak membantu urusan kelulusan kompre dan wisuda serta hal-hal lain yang terkait skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapat referensi.
10. Ibunda Zurmanita yang selalu mencurahkan segala perhatian, kasih sayang dan cintanya kepada penulis. Motivasi dan dukungan yang selalu menguatkan penulis, dan orang yang selalu memeluk penuh dengan kasih disaat penulis merasa goyah. Serta ayahanda Vive Kananda, S.H.,M.M yang juga selalu mendampingi, memberikan cinta dan kasih sayang yang selalu mendukung, mensupport, orang yang paling mengerti di setiap kesulitan yang penulis

hadapi dan bagai pahlawan yang memberikan nasehat-nasehat yang membangun penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

11. Kakak Imelda Vita Sari, S.E. dan adik Tri Larasati yang penulis sayangi dengan sepenuh hati, orang yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berusaha memperbaiki diri.
12. Teman Special N.A Muthia Ayu Veronica yang selalu mensupport dan memberi motivasi hingga skripsi ini selesai.
13. Sahabat Panji yang selalu membimbing dan memberi arahan hingga skripsi ini selesai. Semoga sukses selalu dan murah rezekinya. Aamiin.
14. Sahabat Hamid, Adit, Dika, Eki, Wahyu, Noval, Ari, Sukri, Yoga yang selalu memberi support dari awal hingga skripsi ini selesai.
15. Teman-teman KKN Nagari Singkarak, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok. Sukses selalu buat kita semua.
16. Kepada rekan-rekan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2017 tanpa terkecuali dan senior-senior dan adek-adek junior Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia membantu dan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
17. Kepada seluruh kawan-kawan Konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Manusia dan sahabat-sahabat terdekat angkatan 2017 yang telah mendukung memberi semangat dan membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.



18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Aamiin Yaa Rabbal'alamin. Dengan tulus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua.

Padang, Juli 2022

Penulis

Aldi Primananda

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat penelitian.....	21
BAB II.....	22
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS .....	22
A. Kajian Teori .....	22
1. Indeks Pembangunan Manusia .....	22
2. Pengeluaran Pemerintah .....	27
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan .....	33
4. Program Bantuan Pangan Non Tunai .....	34
5. Program Indonesia Pintar.....	34
B. Pengaruh Antar Variabel.....	36
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia .....	36
2. Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	37

3. Pengaruh Program Indonesia Pintar terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia .....	38
C. Penelitian Terdahulu .....	39
D. Kerangka Konseptual .....	42
E. Hipotesis .....	44
BAB III .....	45
METODE PENELITIAN .....	45
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Defenisi Operasional Variabel .....	46
F. Teknik Analisis Data .....	48
1) Pemilihan Model Estimasi Data Panel .....	48
2) Uji Asumsi Klasik .....	51
3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	52
4) Uji Hipotesis .....	52
BAB IV .....	54
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Hasil Penelitian .....	54
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	54
a. Kondisi Geografis Indonesia .....	54
b. Jumlah Penduduk Indonesia .....	55
2. Deskripsi Variabel Penelitian .....	57
a. Deskripsi Perkembangan Kualitas Sumber Daya Manusia .....	58
b. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan .....	61

c.	Deskripsi Program Bantuan Pangan Non Tunai.....	63
d.	Deskripsi Program Indonesia Pintar.....	66
3.	Teknik Analisis Data.....	69
1)	Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	70
2)	Uji Regresi Data Panel.....	72
3)	Uji Hipotesis.....	75
4)	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	76
B.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
1.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	77
2.	Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	79
3.	Pengaruh Program Indonesia Pintar terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	83
BAB V.....		86
KESIMPULAN DAN SARAN.....		86
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN.....		93

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Dalam Satuan Indeks) Tahun 2018-2020 .....	5
Tabel 1.2 Data dan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Juta Rupiah ) di Indonesia Tahun 2018-2020.....	9
Tabel 1.3 Data dan Pertumbuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Jumlah Orang Penerima) di Indonesia Tahun 2018-2020 .....	13
Tabel 1.4 Data dan Pertumbuhan Program Indonesia Pintar (PIP) (Jumlah Orang Penerima) di Indonesia Tahun 2018-2020 .....	17
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Indoneisa Tahun 2013-2020 .....	56
Tabel 4.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi Indonesia tahun 2018-2020 (Dalam Satuan Indeks).....	59
Tabel 4.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di 34 Provinsi Indonesia tahun 2018-2020 (Juta Rupiah).....	62
Tabel 4.4 Perkembangan Program Bantuan Pangan Non Tunai di 34 Provinsi Indonesia tahun 2018-2020 (Jumlah Orang Penerima).....	65
Tabel 4.5 Perkembangan Program Indonesia Pintar di 34 Provinsi Indonesia tahun 2018-2020 (Jumlah Orang Penerima) .....	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....	70
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman .....	71
Tabel 4.8 Uji Lagrange Multiplier .....	72
Tabel 4.9 Hasil Estimasi <i>Random Effect Model (REM)</i> .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	43
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintar .....	94
Lampiran 2. Hasil Uji Chow .....	99
Lampiran 3. Hasil Uji Hausman.....	99
Lampiran 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier .....	99
Lampiran 5. Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i> .....	100

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan publik menjadi lebih baik demi tercapainya pembangunan yang maksimal, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek di seluruh bidang, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan publik, seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta pembangunan di bidang sosial lainnya. Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Pembangunan ini diartikan sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang ada pada manusia. Dari pilihan itu, pilihan yang terpenting yaitu untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, serta untuk memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan sehingga dapat hidup dengan layak (BPS Sumatera Barat, 2021). Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya diperlukan untuk menghasilkan pilihan ini, kualitas manusia ini dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan sebuah indeks pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, serta standar hidup untuk seluruh negara di dunia (Jasasila, 2020).

Kualitas Sumber Daya Manusia yang di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar standar hidup. Sebagai indikator standar hidup, IPM terdiri atas tiga aspek dasar. Aspek-aspek tersebut antara lain berumur panjang dan sehat, pengetahuan beserta kehidupan yang layak. Karena berbagai



faktor, ketiga aspek tersebut memiliki penjelasan yang sangat luas. Untuk mengukur aspek kesehatan, digunakan angka harapan hidup saat lahir serta untuk mengukur aspek pengetahuan digunakan kombinasi indikator angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur kehidupan yang layak, digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap beberapa kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup yang layak (BPS Sumatera Barat, 2021). Jika ketiga aspek indikator indeks ini tinggi, maka dapat dikatakan masyarakat akan semakin sejahtera begitupun sebaliknya, jika ketiga aspek indikator ini rendah maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin rendah (Zainuddin, 2015).

Menurut Sjafi'I dan Hidayati (2009) dalam Fadila & Marwan (2020) Mengatakan syarat utama dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya kualitas manusia yang berkualitas. Tingkat kesejahteraan individu bisa diukur dengan indeks pembangunan manusia yang merupakan suatu metode pengukuran dalam menilai pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia terdiri dari tiga komponen penting yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks standar hidup layak yang bisa memberikan gambaran pembangunan manusia, apabila masyarakat memenuhi ketiga komponen tersebut, maka dapat digolongkan sebagai masyarakat yang sejahtera.

Jhingan (2012) mengatakan bahwa pembentukan modal manusia adalah upaya dalam menemukan serta meningkatkan jumlah orang yang memiliki keterampilan atau keahlian, pendidikan serta pengalaman yang menentukan

pembangunan ekonomi di sebuah negara. Pembentukan modal manusia dimulai dengan peningkatan pendidikan yang memiliki pengaruh dalam memperoleh kesempatan kerja sehingga akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, jumlah pendapatan pun akan meningkat. Todaro & Smith (2011) menyebutkan bahwa prasyarat untuk meningkatkan produktifitas itu sendiri adalah kesehatan. Sementara itu keberhasilan dalam pendidikan juga bertumpu kepada kesehatan yang baik juga (Fadila & Marwan, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) untuk mengetahui capaian indeks pembangunan manusia antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu dengan kategori rendah dengan nilai IPM kecil dari 60, kategori kedua sedang dengan nilai IPM antara 60-70, kategori ketiga tinggi dengan nilai IPM 70-80, selanjutnya kategori keempat sangat tinggi dengan nilai IPM lebih dari 80.

Sejak tahun 1990 perkembangan tingkat kualitas hidup manusia di seluruh dunia diteliti dan laporannya diterbitkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Menurut UNDP (2020) Dalam laporan pembangunan manusia Indonesia, nilai IPM Indonesia pada tahun 2019 adalah 0,718 yang menempatkan Indonesia pada kategori pembangunan manusia yang tinggi, menempatkannya pada 107 dari 189 negara dan wilayah. Menurut UNDP (2020) Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, IPM Indonesia masih berada dibawah IPM Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina, meskipun tren peningkatan IPM di Indonesia dari tahun 1990 sampai saat ini naik sebesar 37,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah persaingan global saat ini.

Upaya untuk meningkatkan IPM tidak bisa dilepaskan dari upaya simultan untuk meningkatkan IPM di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), IPM di Indonesia periode 2018-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berikut adalah Tabel 1.1 Data dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1 Data dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Dalam Satuan Indeks) Tahun 2018-2020**

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia						MEAN
	2018		2019		2020		
	IPM	(%)	IPM	(%)	IPM	(%)	
Aceh	71.19	0.83	71.90	0.99	71.99	0.13	<b>71.69</b>
Sumatera Utara	71.18	0.86	71.74	0.78	71.77	0.04	<b>71.56</b>
Sumatera Barat	71.73	0.68	72.39	0.91	72.38	-0.01	<b>72.17</b>
Riau	72.44	0.90	73.00	0.77	72.71	-0.40	<b>72.72</b>
Jambi	70.65	0.93	71.26	0.86	71.29	0.04	<b>71.07</b>
Sumatera Selatan	69.39	0.76	70.02	0.90	70.01	-0.01	<b>69.81</b>
Bengkulu	70.64	0.98	71.21	0.80	71.40	0.27	<b>71.08</b>
Lampung	69.02	1.12	69.57	0.79	69.69	0.17	<b>69.43</b>
Kep. Bangka Belitung	70.67	0.96	71.30	0.88	71.47	0.24	<b>71.15</b>
Kep. Riau	74.84	0.52	75.48	0.85	75.59	0.15	<b>75.30</b>
Dki Jakarta	80.47	0.51	80.76	0.36	80.77	0.01	<b>80.67</b>
Jawa Barat	71.30	0.86	72.03	1.01	72.09	0.08	<b>71.81</b>
Jawa Tengah	71.12	0.84	71.73	0.85	71.87	0.19	<b>71.57</b>
DI Yogyakarta	79.53	0.80	79.99	0.58	79.97	-0.03	<b>79.83</b>
Jawa Timur	70.77	0.71	71.50	1.02	71.71	0.29	<b>71.33</b>
Banten	71.95	0.74	72.44	0.68	72.45	0.01	<b>72.28</b>
Bali	74.77	0.63	75.38	0.81	75.50	0.16	<b>75.22</b>
Nusa Tenggara Barat	67.30	1.07	68.14	1.23	68.25	0.16	<b>67.90</b>
Nusa Tenggara Timur	64.39	1.03	65.23	1.29	65.19	-0.06	<b>64.94</b>
Kalimantan Barat	66.98	1.07	67.65	0.99	67.66	0.01	<b>67.43</b>
Kalimantan Tengah	70.42	0.89	70.91	0.69	71.05	0.20	<b>70.79</b>
Kalimantan Selatan	70.17	0.74	70.72	0.78	70.91	0.27	<b>70.60</b>
Kalimantan Timur	75.83	0.94	76.61	1.02	76.24	-0.49	<b>76.23</b>
Kalimantan Utara	70.56	1.02	71.15	0.83	70.63	-0.74	<b>70.78</b>
Sulawesi Utara	72.20	0.75	72.99	1.08	72.93	-0.08	<b>72.71</b>
Sulawesi Tengah	68.88	1.12	69.50	0.89	69.55	0.07	<b>69.31</b>
Sulawesi Selatan	70.90	0.79	71.66	1.06	71.93	0.38	<b>71.50</b>
Sulawesi Tenggara	70.61	1.06	71.20	0.83	71.45	0.35	<b>71.09</b>
Gorontalo	67.71	1.03	68.49	1.14	68.68	0.28	<b>68.29</b>
Sulawesi Barat	65.10	1.23	65.73	0.96	66.11	0.57	<b>65.65</b>
Maluku	68.87	0.99	69.45	0.84	69.49	0.06	<b>69.27</b>
Maluku Utara	67.76	0.83	68.70	1.37	68.49	-0.31	<b>68.32</b>
Papua Barat	63.74	1.18	64.70	1.48	65.09	0.60	<b>64.51</b>
Papua	60.06	1.62	60.84	1.28	60.44	-0.66	<b>60.45</b>
<b>MEAN</b>	<b>70.39</b>	0.90	<b>71.04</b>	0.92	<b>71.08</b>	0.06	<b>70.84</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>71.39</b>	0.81	<b>71.92</b>	0.74	<b>71.94</b>	0.03	<b>71.75</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020, meskipun tren IPM cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Rata-rata indeks pembangunan manusia selama tahun 2018-2020 sebesar 70.84. Terdapat 19 provinsi yang memiliki rata-rata indeks pembangunan manusia diatas rata-rata indeks pembangunan manusia. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki rata-rata indeks pembangunan manusia tertinggi di Indonesia selama tahun 2018-2020 yaitu sebesar 80.67. Terdapat 15 provinsi yang memiliki rata-rata indeks pembangunan manusia dibawah rata-rata indeks pembangunan manusia. Papua merupakan provinsi yang memiliki rata-rata indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia selama tahun 2018-2020 yaitu sebesar 60.45. Dapat disimpulkan bahwa masih adanya perbedaan IPM yang tinggi antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa faktor turunnya rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan dan Pandemi Covid-19 ikut memberikan dampak perlambatan pertumbuhan IPM pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

Menurut Mathai dkk. (2020) Indeks pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor, salah satunya adalah pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan serta perlindungan sosial. Menurut Rostow dalam model pembangunan juga menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi, aktifitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan, program pelayanan kesehatan. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan dan aktivitas

sosial tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran bantuan sosial. Dimana Kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Mangkoesoebroto, 2001).

Menurut Sukirno (2005) menyatakan bahwasannya pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yang mana digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat guna mendorong peningkatan sumber daya manusia.

Dalam mengeluarkan anggaran untuk proses pembangunan, pemerintah membagi kedalam beberapa fungsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja pemerintah menurut fungsi terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial. Menurut Mangkoesoebroto (2016) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan sesuatu kebijakan tertentu mempunyai konsekuensi biaya yang wajib dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran untuk pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk sesuatu bidang membuktikan komitmen pemerintah terhadap kasus pada bidang tersebut.

Menurut Kemenkeu (2022) Program perlindungan sosial merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan bangsa, khususnya bagi mereka yang miskin dan rentan terhadap kemiskinan. Indonesia telah memiliki program perlindungan sosial yang bervariasi seperti mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Pra Kerja, Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Bidikmisi Anak Usia Sekolah, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Usaha Usia Kerja/Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Subsidi energi listrik dan gas 3kg, Pelatihan UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, Asistensi dan Rehabilitasi Lanjut Usia, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (RTLH/BSPS) serta lain sebagainya. Selain itu, pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial sebagai variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia lebih ditekankan untuk mendukung atau membantu masyarakat miskin dan rentan terhadap kemiskinan karena status mereka sebagai pihak yang terkena dampak signifikan ketika terjadi guncangan ekonomi seperti meningkatnya harga barang dan bahan bakar (Adah dkk., 2019).

Menurut Mankiw (2006) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan kualitas modal manusia, yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Perbaikan pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia diharapkan mampu memperluas kesempatan guna mencapai kehidupan yang layak. Modal manusia yang mengacu pada perbaikan pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Berikut adalah data dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di Indonesia tahun 2018-2020.

**Tabel 1.2 Data dan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (Juta Rupiah ) di Indonesia Tahun 2018-2020**

Provinsi	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan						MEAN
	2018		2019		2020		
	Kesehatan	(%)	Kesehatan	(%)	Kesehatan	(%)	
Aceh	2.140.530	15,37	1.839.798	-16,35	1.852.733	0,70	<b>1.944.354</b>
Sumatera Utara	630.634	21,45	578.525	-9,01	703.619	17,78	<b>637.593</b>
Sumatera Barat	647.856	12,95	836.606	22,56	877.271	4,64	<b>787.244</b>
Riau	1.111.198	7,65	1.107.333	-0,35	1.141.954	3,03	<b>1.120.162</b>
Jambi	454.212	-88,73	445685	-1,91	491.222	9,27	<b>463.706</b>
Sumatera Selatan	299.836	-63,94	374.434	19,92	278.534	-34,43	<b>317.601</b>
Bengkulu	403.932	-3,11	371.526	-8,72	429.527	13,50	<b>401.662</b>
Lampung	553.185	-3,88	729.021	24,12	715.494	-1,89	<b>665.900</b>
Kep. Bangka Belitung	279.273	10,92	293661	4,90	244.415	-20,15	<b>272.450</b>
Kep. Riau	292.821	8,66	289.904	-1,01	321.833	9,92	<b>301.519</b>
Dki Jakarta	9.907.847	32,97	9.691.198	-2,24	10.371.903	6,56	<b>9.990.316</b>
Jawa Barat	1.222.810	28,68	1.387.758	11,89	2.054.108	32,44	<b>1.554.892</b>
Jawa Tengah	2.315.107	-3,72	2.522.484	8,22	2.732.002	7,67	<b>2.523.198</b>
DI Yogyakarta	156.504	6,03	170.682	8,31	227.316	24,91	<b>184.834</b>
Jawa Timur	3.067.355	0,08	4.415.102	30,53	4.943.581	10,69	<b>4.142.013</b>
Banten	546.712	4,97	539425	-1,35	1.019.800	47,10	<b>701.979</b>
Bali	562.036	18,08	609.414	7,77	548.429	-11,12	<b>573.293</b>
Nusa Tenggara Barat	524.613	-95,08	646.654	18,87	583.874	-10,75	<b>585.047</b>
Nusa Tenggara Timur	305.991	-9,43	321.189	4,73	533.392	39,78	<b>386.857</b>
Kalimantan Barat	456.914	-9,72	463.207	1,36	520.919	11,08	<b>480.347</b>
Kalimantan Tengah	449.986	18,03	424.077	-6,11	464.179	8,64	<b>446.081</b>
Kalimantan Selatan	907.232	-6,10	1.013.162	10,46	1.120.939	9,61	<b>1.013.778</b>
Kalimantan Timur	1.000.451	-11,75	1.120.415	10,71	1.330.421	15,78	<b>1.150.429</b>
Kalimantan Utara	283.872	-0,57	237.931	-19,31	265.158	10,27	<b>262.320</b>
Sulawesi Utara	698.042	61,78	807.362	13,54	788.496	-2,39	<b>764.633</b>
Sulawesi Tengah	442.815	18,43	471.314	6,05	497.856	5,33	<b>470.662</b>
Sulawesi Selatan	675.874	10,98	763197	11,44	955.760	20,15	<b>798.277</b>
Sulawesi Tenggara	310.396	14,05	301.067	-3,10	753.263	60,03	<b>454.909</b>
Gorontalo	131.453	-15,19	142.772	7,93	170.707	16,36	<b>148.311</b>
Sulawesi Barat	200.554	-21,57	189265	-5,96	215.463	12,16	<b>201.761</b>
Maluku	285.234	-10,01	247.388	-15,30	294.773	16,08	<b>275.798</b>
Maluku Utara	184.425	-32,45	228.853	19,41	391.301	41,51	<b>268.193</b>
Papua Barat	110.058	-96,61	248.906	55,78	165.904	-50,03	<b>174.956</b>
Papua	903.231	86,78	1.216.946	25,78	1.308.101	6,97	<b>1.142.759</b>
<b>MEAN</b>	<b>954.794</b>	13,01	<b>1.030.772</b>	7,37	<b>1.156.301</b>	10,86	<b>1.047.289</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>32.462.989</b>	13,01	<b>35.046.261</b>	7,37	<b>39.314.247</b>	10,86	<b>35.607.832</b>

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2022



Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami peningkatan selama tahun 2018-2020, meskipun tren pengeluaran pemerintah sektor kesehatan cenderung berfluktuatif terutama pada tahun 2019-2020. Rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan selama tahun 2018-2020 sebesar Rp. 1.047.289. Terdapat 8 provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan diatas rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tertinggi di Indonesia selama tahun 2018-2020 yaitu sebesar Rp. 9.990.316. Terdapat 26 provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dibawah rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Gorontalo merupakan provinsi yang memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terendah di Indonesia selama tahun 2018-2020 yaitu sebesar Rp. 148.311. Perbedaan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan signifikan antara DKI Jakarta dan Gorontalo dapat disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk serta masih adanya ketimpangan dalam pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Jika dibandingkan tabel 1.2 dengan tabel 1.1, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami pertumbuhan tren yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami pertumbuhan peningkatan sebesar 10,86% dibandingkan tahun 2019 yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,37%. Disisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru mengalami tren pertumbuhan yang menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,03% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 0,74%. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tren yang meningkat pada

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan justru diikuti tren penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini bertentangan dengan Covey pada penelitian Nasution dkk (2021), bahwa untuk menciptakan manusia yang produktif, kesehatan adalah hal yang paling penting dan harus ditingkatkan kualitasnya. Fenomena ini diduga terjadi karena Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kualitas pembangunan manusia menurun serta mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan pengeluaran sektor kesehatan dalam jumlah lebih banyak untuk memberikan fasilitas yang memadai dan perawatan yang lebih baik bagi masyarakat yang terkena COVID-19 (Kemenkeu, 2020)

Selanjutnya Program Bantuan Pangan Non Tunai juga berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Karena Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah program program rutin dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bahan pangan sehingga dengan adanya program ini tentunya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah upaya mereformasi Program Subsidi Raskin yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden RI guna meningkatkan efektifitas serta ketetapan sasaran program, dan untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran bantuan pangan non tunai ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2017 pada beberapa daerah yang terpilih di Indonesia dengan akses serta fasilitas yang memadai (Bappenas, 2017). Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan dalam bentuk non tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, dengan menerapkan mekanisme akun elektronik sehingga hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang telah

bekerjasama dengan bank Himbara. Sehingga dengan adanya program ini dapat meringankan beban KPM dan meningkatkan akses rakyat miskin akan gizi yang seimbang, sehingga secara garis besar penyaluran bantuan ini tentunya dapat berdampak bagi peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan penerima manfaat. Besaran manfaat yang diterima oleh KPM dalam program BPNT pada mulanya senilai Rp 110.000.- kemudian mengalami 2 kali kenaikan yakni Rp 150.000.- dan sekarang ini sebesar Rp 200.000/KPM/bulan yang mana tidak dapat diambil secara tunai, hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan sesuai kebutuhan di E-warong (Agustina & Megawati, 2022).

Berikut adalah data dan pertumbuhan program bantuan pangan non tunai di Indonesia pada tahun 2018-2020.

**Tabel 1.3 Data dan Pertumbuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Jumlah Orang Penerima) di Indonesia Tahun 2018-2020**

Provinsi	Bantuan Pangan Non Tunai						MEAN
	2018		2019		2020		
	BPNT	(%)	BPNT	(%)	BPNT	(%)	
Aceh	379.496	-	374.575	-1,31	426.306	12,13	<b>393.459</b>
Sumatera Utara	687.704	-	672.539	-2,25	711.409	5,46	<b>690.551</b>
Sumatera Barat	247.008	-	235.406	-4,93	273.875	14,05	<b>252.096</b>
Riau	224.599	-	220.172	-2,01	269.079	18,18	<b>237.950</b>
Jambi	155.622	-	151.537	-2,70	177.405	14,58	<b>161.521</b>
Sumatera Selatan	460.336	-	445.980	-3,22	490.112	9,00	<b>465.476</b>
Bengkulu	125.740	-	121.325	-3,64	131.699	7,88	<b>126.255</b>
Lampung	601.516	-	599.943	-0,26	726.565	17,43	<b>642.675</b>
Kep. Bangka Belitung	42.824	-	40.977	-4,51	51.092	19,80	<b>44.964</b>
Kep. Riau	59.992	-	48.607	-23,42	55.969	13,15	<b>54.856</b>
Dki Jakarta	211.966	-	147.665	-43,55	186.388	20,78	<b>182.006</b>
Jawa Barat	2.506.287	-	2.406.595	-4,14	3.145.688	23,50	<b>2.686.190</b>
Jawa Tengah	2.525.856	-	2.465.034	-2,47	3.272.834	24,68	<b>2.754.575</b>
DI Yogyakarta	315.211	-	289.107	-9,03	312.365	7,45	<b>305.561</b>
Jawa Timur	2.872.569	-	2.776.058	-3,48	3.425.588	18,96	<b>3.024.738</b>
Banten	478.888	-	462.482	-3,55	529.331	12,63	<b>490.234</b>
Bali	130.087	-	128.889	-0,93	163.330	21,09	<b>140.769</b>
Nusa Tenggara Barat	466.251	-	473.038	1,43	523.120	9,57	<b>487.470</b>
Nusa Tenggara Timur	452.442	-	452.255	-0,04	481.895	6,15	<b>462.197</b>
Kalimantan Barat	221.063	-	219.139	-0,88	287.559	23,79	<b>242.587</b>
Kalimantan Tengah	80.036	-	79.485	-0,69	92.749	14,30	<b>84.090</b>
Kalimantan Selatan	146.932	-	149.934	2,00	177.577	15,57	<b>158.148</b>
Kalimantan Timur	115.103	-	111.256	-3,46	118.017	5,73	<b>114.792</b>
Kalimantan Utara	22.978	-	22.560	-1,85	26.595	15,17	<b>24.044</b>
Sulawesi Utara	146.243	-	144.540	-1,18	156.753	7,79	<b>149.179</b>
Sulawesi Tengah	201.614	-	200.182	-0,72	203.629	1,69	<b>201.808</b>
Sulawesi Selatan	432.759	-	432.339	-0,10	604.391	28,47	<b>489.830</b>
Sulawesi Tenggara	153.857	-	154.154	0,19	186.427	17,31	<b>164.813</b>
Gorontalo	89.119	-	90.767	1,82	106.312	14,62	<b>95.399</b>
Sulawesi Barat	73.900	-	73.238	-0,90	96.158	23,84	<b>81.099</b>
Maluku	124.412	-	124.577	0,13	110.945	-12,29	<b>119.978</b>
Maluku Utara	50.748	-	49.647	-2,22	46.517	-6,73	<b>48.971</b>
Papua Barat	90.726	-	88.975	-1,97	59.609	-49,26	<b>79.770</b>
Papua	444.460	-	431.660	-2,97	107.251	-302,48	<b>327.790</b>
<b>MEAN</b>	<b>451.128</b>	<b>-</b>	<b>437.783</b>	<b>-3,05</b>	<b>521.604</b>	<b>16,07</b>	<b>470.172</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>15.338.344</b>	<b>-</b>	<b>14.884.637</b>	<b>-3,05</b>	<b>17.734.539</b>	<b>16,07</b>	<b>15.985.840</b>

Sumber : Kemensos RI, 2022

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa rata-rata Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2020, dengan tren program bantuan pangan non tunai yang meningkat selama tahun 2019-2020. Rata-rata program bantuan pangan non tunai selama tahun 2018-2020 sebesar 470.172 orang. Terdapat 8 provinsi yang memiliki rata-rata program bantuan pangan non tunai diatas rata-rata program bantuan non tunai. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki rata-rata program bantuan pangan non tunai tertinggi di Indonesia selama tahun 2018-2020 yaitu sebesar 3.024.738 orang. Terdapat 26 provinsi yang memiliki rata-rata program bantuan pangan non tunai dibawah rata-rata program bantuan pangan non tunai. Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki rata-rata program bantuan pangan non tunai terendah di Indonesia selama tahun 2018-2020 yaitu sebesar 24.044. Perbedaan program bantuan pangan non tunai yang signifikan antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara dapat disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk serta masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian bantuan program dari pemerintah. Jika dibandingkan tabel 1.3 dengan tabel 1.1 Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami pertumbuhan tren yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pengeluaran bantuan pangan non tunai (BPNT) mengalami pertumbuhan peningkatan yang signifikan sebesar 16,07% dibandingkan tahun 2019 yang justru berada pada tren negatif sebesar -3,05%. Disisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru mengalami tren pertumbuhan yang menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,03% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 0,74%. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran program bantuan pangan non tunai tidak menyebabkan

meningkatnya indeks pembangunan manusia. Hal ini justru berbanding terbalik dengan tujuan dan pencapaian yang diharapkan oleh pemerintah melalui program BPNT ini untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Kemensos, 2022).

Selain itu, program Indonesia pintar berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Karena program Indonesia pintar merupakan program rutin dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pendidikan sehingga tentunya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bentuk pengeluaran sosial di bidang pendidikan yang ikut menunjang peningkatan kesejahteraan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Pada hakikatnya PIP merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu pemilik KKS. Penerima KIP adalah anak usia 6 - 21 tahun yang bersekolah maupun tidak bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dengan adanya program ini tentu akan memiliki tujuan yang akan dicapai dengan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan yang baik tentu akan menciptakan kualitas SDM yang cerdas dan berkualitas (Yusup dkk., 2019). Dikutip dari Eka Rahmawati (2022) Bantuan PIP diberikan kepada peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang

ditempuh. Berikut besaran jumlah dana yang diberikan untuk peserta didik. Peserta didik SD/MI/Paket A sebesar Rp.450.000 per tahun. Peserta didik SMP/MTS/Paket B sebesar Rp.750.000 per tahun. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C sebesar Rp.1.000.000 per tahun.

Berikut adalah data dan pertumbuhan program Indonesia pintar di Indonesia pada tahun 2018-2020.

**Tabel 1.4 Data dan Pertumbuhan Program Indonesia Pintar (PIP) (Jumlah Orang Penerima) di Indonesia Tahun 2018-2020**

Provinsi	Program Indonesia Pintar						MEAN
	2018		2019		2020		
	PIP	(%)	PIP	(%)	PIP	(%)	
Aceh	573.513	-	596.623	3,87	563.008	-5,97	<b>577.715</b>
Sumatera Utara	1.225.212	-	1.172.091	-4,53	1.149.178	-1,99	<b>1.182.160</b>
Sumatera Barat	480.954	-	436.171	-10,27	428.247	-1,85	<b>448.457</b>
Riau	385.421	-	359.618	-7,18	366.761	1,95	<b>370.600</b>
Jambi	235.014	-	214.185	-9,72	173.227	-23,64	<b>207.475</b>
Sumatera Selatan	640.953	-	574.969	-11,48	559.199	-2,82	<b>591.707</b>
Bengkulu	168.770	-	168.978	0,12	177.626	4,87	<b>171.791</b>
Lampung	682.665	-	645.508	-5,76	690.225	6,48	<b>672.799</b>
Kep. Bangka Belitung	54.414	-	49.529	-9,86	52.277	5,26	<b>52.073</b>
Kep. Riau	99.076	-	110.217	10,11	95.748	-15,11	<b>101.680</b>
Dki Jakarta	187.363	-	148.889	-25,84	271.875	45,24	<b>202.709</b>
Jawa Barat	3.014.947	-	2.869.258	-5,08	3.051.291	5,97	<b>2.978.499</b>
Jawa Tengah	2.690.419	-	2.662.353	-1,05	2.604.973	-2,20	<b>2.652.582</b>
DI Yogyakarta	314.598	-	284.428	-10,61	316.126	10,03	<b>305.051</b>
Jawa Timur	2.127.271	-	2.479.151	14,19	2.163.478	-14,59	<b>2.256.633</b>
Banten	579.693	-	549.300	-5,53	662.008	17,03	<b>597.000</b>
Bali	218.767	-	207.353	-5,50	202.602	-2,34	<b>209.574</b>
Nusa Tenggara Barat	583.092	-	559.048	-4,30	471.008	-18,69	<b>537.716</b>
Nusa Tenggara Timur	897.035	-	780.559	-14,92	721.427	-8,20	<b>799.674</b>
Kalimantan Barat	377.350	-	385.764	2,18	357.793	-7,82	<b>373.636</b>
Kalimantan Tengah	132.593	-	112.593	-17,76	100.886	-11,60	<b>115.357</b>
Kalimantan Selatan	191.020	-	188.965	-1,09	172.340	-9,65	<b>184.108</b>
Kalimantan Timur	182.051	-	184.002	1,06	227.589	19,15	<b>197.881</b>
Kalimantan Utara	43.251	-	39.516	-9,45	41.950	5,80	<b>41.572</b>
Sulawesi Utara	178.401	-	159.653	-11,74	191.496	16,63	<b>176.517</b>
Sulawesi Tengah	383.243	-	261.645	-46,47	253.461	-3,23	<b>299.450</b>
Sulawesi Selatan	774.933	-	694.264	-11,62	733.238	5,32	<b>734.145</b>
Sulawesi Tenggara	312.062	-	290.850	-7,29	291.718	0,30	<b>298.210</b>
Gorontalo	129.532	-	120.718	-7,30	129.930	7,09	<b>126.727</b>
Sulawesi Barat	147.176	-	143.426	-2,61	167.696	14,47	<b>152.766</b>
Maluku	180.710	-	206.976	12,69	150.791	-37,26	<b>179.492</b>
Maluku Utara	84.746	-	98.080	13,60	86.395	-13,53	<b>89.740</b>
Papua Barat	91.375	-	155.565	41,26	123.604	-25,86	<b>123.515</b>
Papua	331.722	-	440.249	24,65	343.800	-28,05	<b>371.924</b>
<b>MEAN</b>	<b>549.981</b>	<b>-</b>	<b>539.720</b>	<b>-1,90</b>	<b>532.146</b>	<b>-1,42</b>	<b>540.616</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>18.669.376</b>	<b>-</b>	<b>18.398.399</b>	<b>-1,47</b>	<b>18.092.891</b>	<b>-1,69</b>	<b>18.386.889</b>

Sumber : PIP Kemendikbud, 2022



Tabel 1.4 Memperlihatkan bahwa rata-rata Program Indonesia Pintar (PIP) mengalami penurunan selama periode 2018-2020, meskipun tren program indonesia pintar juga mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Rata-rata program indonesia pintar selama tahun 2018-2020 sebesar 540.616 orang. Terdapat 10 provinsi yang memiliki rata-rata program indonesia pintar diatas rata-rata program indonesia pintar. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki rata-rata program indonesia pintar tertinggi di Indonesia selama tahun 2018-2020 yaitu sebesar 2.978.499 orang. Terdapat 24 provinsi yang memiliki rata-rata program indonesia pintar dibawah rata-rata program indonesia pintar. Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki rata-rata program indonesia pintar terendah di Indonesia selama tahun 2018-2020 yaitu sebesar 41.572 orang. Perbedaan program Indonesia pintar yang signifikan antara Jawa Barat dan Kalimantan Utara dapat disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk serta masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian bantuan program dari pemerintah. Jika dibandingkan tabel 1.4 dengan tabel 1.1 Program Indonesia Pintar (PIP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami pertumbuhan tren yang menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Program Indonesia Pintar (PIP) mengalami tren pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -1,69% yang menurun dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar -1,47%. Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,03% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 0,74%. Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan Program Indonesia Pintar (PIP) akan diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Penurunan program indonesia pintar hingga mencapai tren yang negatif diduga karena

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan fokusnya pemerintah pada pengeluaran program kesehatan serta kurangnya realisasi pemerintah mengenai program Indonesia pintar pada masyarakat dan penyebarannya tidak merata sehingga terdapat masalah atau fenomena pada tahun tersebut. Menurut Zamjani (2018) pemerintah bersama dengan kemensos perlu berkolaborasi dalam mempercepat proses pembaruan dan pepadanan data sehingga kesalahan target penerima dapat diminimalisir, dengan begitu masyarakat yang memiliki kualitas kesejahteraan yang rendah bisa terbantu dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia ”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia ?
2. Sejauhmana pengaruh program bantuan pangan non tunai terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia ?
3. Sejauhmana pengaruh program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia ?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, dan program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
2. Pengaruh program bantuan pangan non tunai terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
3. Pengaruh program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
4. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, dan program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

**D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah Indonesia, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, dan program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai kualitas sumber daya manusia.
3. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, literatur maupun penelitian lebih lanjut mengenai kualitas sumber daya manusia.
4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan baru mengenai pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, program bantuan pangan non tunai, dan program Indonesia pintar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
5. Untuk memperoleh Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.